

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ratio pengaturan pembatalan layanan HT-el yang diatur dalam Permen ATR/KBPN No. 5/2020 dan menganalisis pengaturan pembatalan layanan HT-el bertentangan atau tidak dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan UU HT. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian diketahui: *Pertama*, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dilaksanakan dengan berpedoman pada UU HT, UU ITE dan UU Pelayanan Publik. Di dalam Pasal 13 ayat (4) UU HT hanya mengatur satu hari pendaftaran hak tanggungan dilakukan, yaitu pada hari ketujuh. Ketentuan ini cukup menghambat pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Sedangkan pada UU ITE dan UU Pelayanan Publik, pejabat administrasi dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi force majeure. Dengan demikian terjadi disharmoni antara UU HT dengan UU ITE dan UU Pelayanan Publik. Pembebasan tanggung jawab dalam UU ITE dan UU Pelayanan Publik dijadikan sebagai ratio pengaturan Pasal 25 ayat (1) Permen ATR/KBPN No. 5/2020. *Kedua* pengaturan Pasal 25 ayat (1) Permen ATR/KBPN No. 5/2020 yang membatalkan layanan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik apabila terjadi force majeure adalah bertentangan dengan asas kepastian dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan UU HT khususnya Pasal 13 ayat (4) sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci : force majeure, pembebasan tanggung jawab, pembatalan layanan.



Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the regulation ratio of HT-el service cancellation regulated in Permen ATR/KBPN 5/2020 and analyzing arrangements for the cancellation of HT-el services whether or not it is contrary to the principles of legal certainty and legal protection which are the objectives of Mortgage Law. This type of research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. From the results of the research it is known that: First, electronic registration of mortgage rights is carried out based on the Mortgage Law, ITE Law and the Public Service Law. Article 13 paragraph (4) of the Mortgage Law, it only regulates one day of registration of mortgage rights, on the seventh day. This provision is quite an obstacle to the implementation of electronic mortgage registration. Whereas in the ITE Law and the Public Service Law, administrative officials can be exempted from responsibility in the event of a force majeure. Thus there is disharmony between the Mortgage Law and the ITE Law and the Public Service Law. The release of responsibility in the ITE Law and the Public Service Law is used as the ratio for the regulation of Article 25 paragraph (1) Permen ATR/KBPN 5/2020. The second arrangement of Article 25 paragraph (1) Permen ATR/KBPN 5/2020 which cancels the electronic mortgage registration service in the event of force majeure is contrary to the principle of legal certainty and protection which is the objective of the Mortgage Law, especially Article 13 paragraph (4), causing legal uncertainty.

Keywords: force majeure, discharge of responsibility, service cancellation.

